



DAFTAR BACAAN

Buku-Buku :

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Darmalaksana, W. (2022). *Hukum Islam (suatu tinjauan filosofis)*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., Triyono, A., Wau, A., Fatmawati, Khairo, F., Nurwandri, A., & Sinaga, L. B. B. P. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: Infes Media.
- Gozali, D. S. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- H.R, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Itmam, M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Qamar, N., & Salle. (2018). *Logika Dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, T., & Supratiningsih, U. (2020). *Pengantar Ilmu*



- Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, E. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Aceh: BieNa Edukasi.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Umarman Sutopo. (2021). *Pengantar Tata Hukum Indonesia Sebagai Bagian Pengenalan Dasar Ilmu Hukum*. Ponorogo: Sinergi Karya Mulia Digiprint.

Laporan Penelitian:

- Riyanto, S., Sumardjono, M. S. ., Sulistiowati, Hiariej, E. O. ., Hernawan, A., Hasan, D., Yuniza, M. E., Mochtar, Z. A., Wardana, I. G. A. M., Santoso, W. Y., Diantoro, T. D., Nugroho, A. D., Izzati, N. R., & Hikmah, F. (2020). Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. In *Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* (Issue 2).

Jurnal :

- Aditya, Z. F., & Yulistyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), hlm. 38.
- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Dharmasiswa*,



- I(1)*, hlm. 354.
- Andi. (2022). Bias Kewenangan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Ranah Perizinan Pasca Terbitnya Undang Undang Cipta Kerja. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), hlm. 129-130.
- Andika Risqi Irvansyah. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja Legal Position Of Fictious Administrative Approval Since The Enactment Of “Cipta Kerja” Law. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(2), hlm. 209-226.
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Pakuan Law Review*, 4(1), hlm. 80.
- Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 3(1), hlm. 15.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), hlm. 182.
- Januartha, I. M. D., Suwitra, I. M., & Ujianti, N. M. P. (2023). Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), hlm. 268.
- Linawati, A. N., Sa, N., & Juliani, H. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Serta Implikasi Dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 7(3), hlm. 63-64.
- Martin, R. A., & Erliyana, A. (2019). Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), hlm. 948.
- Mayasari, I. (2023). Pembatasan Administrative Silence untuk Sertifikat Halal: Peluang dan Tantangan Keputusan Fiktif Positif dalam UU Cipta Kerja. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), hlm. 2057-2058.



- Nashir, M. A. (2024). Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 2(1), hlm. 92.
- Pratama, Y., Tirtasah, M. I., Ahmady, Y. N., & Wardhana, A. (2019). Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 19(1), h;m. 177.
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), hlm. 167-168.
- Sati, N. I. (2020). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), hlm. 838.
- Suprpto. (2022). Eksistensi Prinsip Fiktif Positif di Bidang Hukum Administrasi. *Jurnal Banua Law Review*, 4(1), hlm. 78.
- Triartha Yuliani, E. (2020). Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *University of Bengkulu Law Journal*, 5(1), hlm.4-7.
- Umar, K. (2023). Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Kajian Putusan Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dan Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY). *Jurnal Yudisial*, 16(2), hlm. 232-249.
- Wahyuni, S., & Wibowo, A. (2023). Kewenangan, Subyek Dan Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *JUSTICE: Jurnal of Law*, 2(1), hlm. 39.
- Wicaksono, D. A., Hantoro, B. F., & Kurniawan, D. (2021). Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Quo Vadis of the State Administrative Court's Authority



- Provision on Deciding Fictitious Posit. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), hlm. 334.
- Wuisang, A., & Nugraha, R. S. (2023). Problematika Perluasan Makna Keputusan Administrasi Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), hlm. 84.
- Zahro, N. E. F., & Basri, A. H. (2023). Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), hlm. 1.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Yurispruden*, 3(2), hlm. 202.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan